

TESIS

**DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)**

***DETERMINANTS OF LABOR ABSORPTION
IN EASTERN PART OF INDONESIA (EPI)***

WAFIQAH ULYA

A052211003



Kepada:

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)**

***DETERMINANTS OF LABOR ABSORPTION
IN EASTERN PART OF INDONESIA (EPI)***

Disusun dan diajukan oleh:

WAFIQAH ULYA

A052211003



Kepada:

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)

Disusun dan diajukan oleh

WAFIQAH ULYA
A052211003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister, Studi Ekonomi Sumberdaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin

pada tanggal **06 Januari 2023**


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Rahmatia, SE., M.A
NIP. 19630625 198702 2 004


Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Program Studi
Ekonomi Sumberdaya,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,


Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19770913 200212 2 002


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 19640205 198810 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wafiqah Ulya
NIM : A052211003
Program Studi : Ekonomi Sumberdaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

“Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI)”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Wafiqah Ulya

PRAKATA

Alhamdulillahirrabbi'lamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan shalawat senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan perunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI)”**.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari paradoks disparitas penyerapan tenaga kerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Penulis bermaksud menyumbangkan konsep untuk menyikapi permasalahan disparitas penyerapan tenaga kerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Rahmatia, SE, MA sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Sabir, SE, M.Si, CWM® sebagai Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program magister, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE, M.Si, CIPM. beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Fatmawati, SE, M.Si dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE, M.Si, CWM® sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Sumberdaya Universitas Hasanuddin atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menjalani studi hingga selesai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program Studi Magister Ekonomi Sumberdaya Universitas Hasanuddin dan kepada seluruh anggota tim penguji: Bapak Dr. Paulus Uppun, SE, MA., Bapak Dr. Agussalim, SE, M.Si dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE, M.Si yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan saran dan kritik yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pascasarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik.

Penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin 2017 (ERUD17E) dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE) yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan moril serta kerja samanya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman Ceribel+1 dan teman-teman Fataz yang senantiasa membantu, menemani dan memberi semangat serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada teman-teman ESD angkatan 2021 yang telah membantu penulis semasa perkuliahan dan seluruh teman yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, atas segala canda dan tawa semangat yang kalian berikan.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda Dr. Hamrullah,.SE,.M.Si, CSF., serta Ibunda Anna Silfiah,.S.Si, Apt yang dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Serta adikku tersayang Aqilah Nurilmi atas segala doa, pengorbanan, kesabaran dan perhatiannya dalam kebersamaan keluarga, sejak awal dan sampai saat terakhir penulis menempuh pendidikan Program Magister.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dalam khasanah pengembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam karya akademik ini, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala aktifitas dan amal usaha kita. Amiin.

Makassar, 10 Januari 2023

Wafiqah Ulya

ABSTRAK

WAFIQAH ULYA. *Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI)* (dibimbing oleh Rahmatia dan Sabir).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, upah minimum, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan data *time series* yang terdiri dari data tahun 2015 sampai dengan 2021 dan data potong lintang yang terdiri dari 17 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan menggunakan aplikasi AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara tidak langsung pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Upah minimum secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan secara tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Kemudian, investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: pengeluaran pemerintah, upah minimum, investasi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja



ABSTRACT

WAFIQAH ULYA. *Determinants of Labor Absorption in Eastern Part of Indonesia (EPI)* (supervised by Rahmatia and Sabir)

This study aims to determine and analyze the effect of government spending, minimum wages, and investment on employment both directly and indirectly in Eastern Part of Indonesia (EPI). The data consisted of secondary data obtained from Statistical Centre Board (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The type of data used was panel data as the combination of time series data consisting of data from 2015 to 2021 and cross section data obtained from 17 provinces in Eastern Part of Indonesia (EPI). The research method was panel regression using AMOS application. The results indicate that direct government spending has a negative and insignificant effect on employment. Meanwhile, government spending indirectly has a negative and significant effect on employment absorption through economic growth. Minimum wage has a direct and significant negative effect on employment, but it has an indirect and negative effect on employment absorption through economic growth. Furthermore, investment directly has a positive and significant effect on employment absorption and indirectly has a negative and significant effect on employment absorption through economic growth.

Keywords: government expenditure, minimum wage, investment, economic growth, labor absorption



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Hubungan Antar Variabel	30
2.3 Tinjauan Empiris	57
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	65
3.1 Kerangka Konseptual	65
3.2 Hipotesis	69
BAB IV METODE PENELITIAN	70
4.1 Lokasi dan Rancangan Penelitian	70
4.2 Jenis dan Sumber Data	70
4.3 Metode Pengumpulan Data	71
4.4 Metode Analisis Data	71
4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	75
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	77
5.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian	77
5.2 Hasil Penelitian	87
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian	92
BAB VI PENUTUP	116
6.1 Kesimpulan	116

6.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	68
Gambar 5.1 Bagan Hasil Penelitian	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode Tahun 2017 - 2021.....	3
Tabel 5.1	Hasil Estimasi Fungsi Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara, ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga menjadi perhatian utama dari waktu ke waktu khususnya bagi negara berkembang. Masalah ini sangat penting karena erat kaitannya dengan tingkat pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan dan kriminalitas di suatu negara. Adanya perluasan penyerapan tenaga kerja sangatlah dibutuhkan dengan tujuan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang masuk ke pasar tenaga kerja. Banyak penduduk yang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat justru telah gagal menghapuskan atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan absolut yang meluas yang tetap menjadi kenyataan kehidupan ekonomi di hampir semua negara yang sedang berkembang (Todaro, 2000).

Terjadinya penambahan jumlah penduduk secara berkala dari waktu ke waktu tentu dapat mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah penduduk meningkat maka akan menyebabkan kemampuan produksi suatu wilayah juga akan ikut meningkat. Namun disisi lain, besarnya jumlah angka penduduk akan menyebabkan pembangunan ekonomi terhambat, apabila kenaikan yang terjadi tidak seimbang antara jumlah penduduk dan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga hal tersebut tentu akan memicu semakin tingginya angka pengangguran di suatu negara.

Indonesia merupakan salah satu negara strategis yang memiliki daerah provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan hal utama dalam kegiatan pembangunan negara yang terus mengalami peningkatan dan diharapkan mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian yang dapat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini terus mengalami perubahan. Industri Indonesia semakin mengarah ke *capital intensive* daripada *labor intensive*. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya pengangguran serta masalah kemiskinan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat.

Terlebih lagi ketersediaan lapangan pekerjaan hanya berpusat pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Dulunya, hasil-hasil pembangunan lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi lebih maju dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia, dan pada akhirnya timbul ketimpangan struktur ekonomi yang mencolok antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Bila diklasifikasikan berdasarkan wilayah, maka wilayah-wilayah di Indonesia dapat dibagi menjadi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah yang termasuk Kawasan Barat Indonesia (KBI) perkembangannya relatif cepat dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga hal inilah yang membuat adanya perbedaan yang sangat jauh pada wilayah-wilayah yang relatif miskin khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah semua wilayah di Indonesia selain

Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Dengan demikian yang termasuk KTI adalah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Tabel 1.1 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode Tahun 2017-2021 (persen)

NO	PROVINSI	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sumatera	94.88	94.99	95.05	93.83	94.31
	Jawa	93.96	94.20	94.36	91.84	92.74
	Bali	98.52	98.63	98.48	94.37	94.63
	KBI	95.94	95.78	95.96	93.35	93.89
2	Kepulauan Nusa Tenggara	96.70	96.64	96.61	95.75	96.61
	Kalimantan	94.84	95.08	95.33	90.7	94.66
	Sulawesi	95.44	95.65	95.8	95.06	95.57
	Kepulauan Maluku	92.69	93.98	93.97	93.64	94.18
	Papua	94.94	95.25	95.06	94.46	95.42
	KTI	94.92	95.32	95.35	93.92	95.28

Sumber: Statistik Indonesia, BPS (data diolah).

Pada **Tabel 1.1** menyatakan bahwa terjadi perbedaan yang sangat mencolok pada jumlah penyerapan tenaga kerja antara KBI dan KTI. Pada tahun 2017-2019 jumlah penyerapan tenaga kerja di KBI lebih tinggi dari pada jumlah penyerapan tenaga kerja di KTI. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan dengan masing-masing jumlah penyerapan tenaga kerja di KBI dan KTI sebesar 93,35 persen dan 93,92 persen. Hal ini terjadi karena di tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran di beberapa wilayah, sehingga menurunkan penyerapan tenaga kerja. Dan pada tahun 2021 kembali meningkat dengan masing-masing jumlah penyerapan tenaga kerja di KBI dan KTI sebesar 93.89 persen dan 95.28 persen. Namun secara keseluruhan tingkat penyerapan tenaga kerja di KTI lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja di KBI.

Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal inilah yang tentunya menyebabkan wilayah yang maju akan semakin maju dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dibanding wilayah lainnya. Dampak atas tidak meratanya persebaran tenaga kerja dikarenakan adanya disparitas pembangunan serta tingkat upah di KBI dan KTI yang menyebabkan munculnya masalah-masalah ketenagakerjaan seperti pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak merata, terjadinya arus migrasi besar-besaran tenaga kerja dari KTI ke KBI serta tingginya jumlah pengangguran di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam perencanaan pembangunan nasional, Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah demi mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia tetapi masih belum mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan kesempatan kerja (Kasau, 2016). Melihat daerah KTI yang begitu luas ditambah lagi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sangat ironis apabila wilayah KTI mengalami ketertinggalan pembangunan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Menurut Kuncoro (2012), bahwa penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam hal pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Namun, tiap tahunnya terjadi penambahan jumlah penduduk, sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat juga bertambah tiap tahunnya. Maka dari itu dibutuhkan penambahan pendapatan negara. Selain dari permintaan dan penawaran pertumbuhan penduduk juga membutuhkan penambahan kesempatan kerja sebagai sumber pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan meningkatkan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan pengentasan kemiskinan (Tambunan, 2011).

Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antar sektor-sektor ekonomi sehingga dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Irwan, 2015). Dalam suatu proses pembangunan ekonomi mencakup aktivitas ekonomi yang mengupayakan pengoptimalan penggunaan faktor-faktor ekonomi yang tersedia sehingga menciptakan nilai ekonomis, salah satunya ialah tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi tentu memberikan dampak yang lebih besar untuk kesempatan kerja kepada negara maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam hal pengalokasian sumber-sumber ekonomi antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui sumber daya manusia. Dalam hal ini ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang perlu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia. Dengan kata lain, yang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja (Suparta, 2014).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan gambaran suatu faktor yang dapat mendorong terjadinya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat karena pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selain itu, peranan pemerintah sangat diperlukan guna menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya akan mensejahterakan seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian serta melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang tidak dapat dilaksanakan oleh rumah tangga ataupun perusahaan. Bagi negara yang sedang berkembang pun tak bisa lepas dari campur tangan pemerintah, karena peranannya yang relatif besar. Selain itu pemerintah tentu akan terus berupaya dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya.

Pengeluaran pemerintah juga digunakan untuk kegiatan produktif lainnya seperti belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, serta prasarana lainnya yang akan memudahkan proses produksi, dan akan menciptakan *multiplier effect*

pada sektor-sektor perekonomian lainnya. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah yang menstimulus perekonomian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran. Peningkatan modal sangatlah berperan penting untuk meningkatkan perekonomian serta menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap pertambahan jumlah angkatan kerja (Todaro, 2013).

Selain itu, hal lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ialah adanya penetapan upah minimum. Pada realitas yang terjadi, upah yang diterima tenaga kerja disebagian besar provinsi lebih rendah dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sehingga akan terjadi kenaikan harga dan selanjutnya berakibat pada kenaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang pada akhirnya akan meningkatkan upah minimum. Bappenas (2016) menyatakan bahwa secara teoritis, perusahaan hanya akan membayar upah tenaga kerja sesuai dengan produktivitas yang dimiliki oleh pekerja, ini berarti tenaga kerja yang produktivitasnya rendah akan menerima upah yang rendah dan begitu juga sebaliknya.

Sehingga dari permasalahan penetapan upah ini muncullah disparitas tenaga kerja pada setiap Provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena upah minimum pada wilayah tertentu lebih besar dibandingkan pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang menyebabkan tenaga kerja akan memilih untuk bermigrasi ke wilayah dengan upah yang jauh lebih besar. Migrasi tenaga kerja ini nantinya dapat membuat jumlah tenaga kerja yang menawarkan jasanya meningkat pada wilayah tertentu saja. Dengan adanya upah minimum yang telah

ditetapkan oleh pemerintah akan berdampak pada lapangan pekerjaan yang tidak dapat menyerap angkatan kerja.

Namun, muncul kekhawatiran bahwa upah minimum mungkin tidak menjadi alat kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan di suatu wilayah cenderung untuk menghindari ketentuan upah minimum. Dan alasan ketiga, beberapa perusahaan lebih memilih untuk mengurangi permintaan untuk pekerja yang kurang terampil. Efek ini terjadi karena perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan para pekerja yang memiliki keterampilan lebih baik yang upahnya telah meningkat, dibanding mengambil pekerja baru dengan mengikuti ketentuan upah minimum.

Selanjutnya penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah melalui dukungan investasi. Dengan adanya dorongan investasi maka pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan dengan lancar sehingga dibutuhkannya kerjasama dan dukungan dari pihak pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan. Besar kecilnya investasi di suatu wilayah sangat mempengaruhi tingkat output yang dihasilkan. Bertambahnya jumlah output di suatu wilayah menandakan bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut A.Y Luntungan (2017), Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi peningkatan terhadap tingkat kesejahteraan, produktivitas, distribusi pendapatan serta kesempatan kerja. Atau dengan kata lain investasi memiliki peran penting dalam ekonomi makro yaitu mempengaruhi permintaan agregat. Bahkan, investasi juga

mempengaruhi siklus bisnis (*business cycle*) serta pembentukan modal (*capital accumulation*). Ketika tingkat investasi meningkat maka akan menyebabkan pembentukan modal. Dinamika penanaman modal tentu sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan menggambarkan marak lesunya pembangunan. Dalam jangka panjang perkembangan investasi sangat berpengaruh pada bertambahnya stok modal dan akan menambah produktivitas.

Di negara yang angka penganggurannya cukup tinggi, dapat memanfaatkan angkatan kerja yang menganggur sebagai sumber pembentukan modal. Teori Neo Klasik menekankan bahwa pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Semakin cepat pertambahan investasi dari pada laju pertumbuhan penduduk, maka akan semakin cepat perkembangan volume stok kapital per tenaga kerja. Karena semakin tinggi rasio kapital per tenaga kerja maka cenderung semakin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Solow dan Swan memusatkan perhatiannya agar bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output akan saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

Disparitas penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada wilayah-wilayah tertentu di Provinsi Indonesia akan menciptakan masalah-masalah ketenagakerjaan. Kondisi ini tentu memberikan gambaran bahwa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Sehingga masalah inilah yang menjadi landasan penulis untuk melakukan kajian tentang bagaimana pengeluaran pemerintah, investasi dan upah minimum mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara umum hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam melengkapi kajian tentang penyerapan tenaga kerja.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan khususnya yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Kajian/Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian dan Konsep Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja ialah banyaknya jumlah lapangan pekerjaan yang telah terisi, yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja di suatu wilayah (Konadi, 2014). Penduduk yang bekerja tentu akan terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa. Banyak tenaga kerja yang tersedia tetapi tidak dapat terserap oleh industri dikarenakan keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar ataupun industri, disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengadakan pendidikan ataupun pelatihan terhadap tenaga kerja agar memiliki *skill* yang berkualitas.

Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pentingnya modal manusia dalam pembangunan telah dimulai pada tahun 1960an berdasarkan pemikiran Theodore Schultz tentang *investment in human capital*. Menurut Schultz, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan. Dalam perkembangannya, Schultz juga memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga, hal ini dapat dicapai

melalui terjadinya peningkatan keahlian/keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Mengingat karena kesempatan kerja sangat terbatas maka pemerintah tentu melakukan upaya dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan yang nantinya dapat menampung maupun mempengaruhi tingkat pengangguran yang berada di tengah masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Semakin bertambahnya lapangan pekerjaan tentu akan membawa dampak yang sangat luas terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Upaya perluasan kesempatan kerja ditujukan untuk mendorong pasar tenaga kerja yang fleksibel, termasuk dalam upaya penurunan biaya ekonomi yang tinggi agar terciptanya lapangan pekerjaan (Ridwan, 2014).

Penyerapan tenaga kerja menunjukkan jumlah atau kuantitas dari tenaga kerja yang digunakan pada beberapa sektor atau unit usaha tertentu. Atau dengan kata lain tenaga kerja merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dipekerjakan dalam satu unit usaha (Areta, 2018). Selain itu penyerapan tenaga kerja berbanding lurus dengan nilai produksi. Karena semakin tinggi nilai produksi maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja. Hal ini didukung oleh penelitian Budiawan (2013) dimana naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi berpengaruh pada nilai produksi.

Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi akan mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang terpenting dari tenaga kerja bukanlah dari segi kuantitas melainkan kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik maka akan terjadi peningkatan produksi. Tenaga kerja memiliki sifat heterogen baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, kemampuan kerja,

kesehatan, pendidikan, keahlian dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan tenaga kerja guna mendukung pembangunan nasional Indonesia (*Manpower Planning*). Dengan adanya kesempatan kerja juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian yang menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Prihatini, 2020).

Penyerapan tenaga kerja bisa dikaitkan dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, yang dimana permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan. Didalam dunia kerja atau dalam hal penyerapan tenaga kerja di setiap sektornya berbeda-beda untuk penyerapan tenaga kerjanya, misalkan saja pada keahlian khusus, pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk dapat bekerja pada sektor formal (Bellante, 2006).

Beaudry (2018) menyatakan bahwa rendahnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi dari beberapa faktor-faktor, seperti output, jumlah perusahaan, upah dan produktivitas tenaga kerja. Dimana perkembangan output mengindikasikan perkembangan permintaan pasar. Semakin tinggi permintaan pasar akan output, semakin banyak produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya permintaan tenaga kerja oleh sektor ekonomi.

2.1.2 Pengertian dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi apabila kegiatan ekonomi negara tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain, pertumbuhannya terjadi jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian di suatu negara bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013). Schumpter dalam Boediono (2012) juga menyatakan bahwa pertumbuhan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyak faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara rasional. Menurut ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999). Secara umum Harijono (2010) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan input tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan tenaga kerja. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara terdiri dari 3 hal, yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian.

2. Sumber daya manusia merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, atau dengan kata lain jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.

3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Namun, apabila jumlah penduduk semakin meningkat maka peningkatannya ini akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Sehingga akan menurunkan tingkat kesejahteraan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kemudian pada keadaan ini, pendapatan para pekerja hanya mencapai tingkat *subsistence*. Dengan arti lain bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka produksi marginal akan mengalami penurunan. Oleh karena itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Sukirno, 2012).

1. Teori Kaum Klasik

Kaum klasik berpendapat bahwa mekanisme pasar akan secara otomatis menjadikan perekonomian berjalan dengan efisien.

a. Teori Adam Smith

Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada penambahan jumlah penduduk yang akan memperluas dan mendorong spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja semakin bertambah.

b. Teori David Ricardo

David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah mengalami penurunan dan perekonomian menjadi stagnan.

c. Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Hal ini berarti terjadinya kenaikan jumlah penduduk berarti permintaan juga akan semakin meningkat. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dibutuhkan kenaikan kapital untuk investasi, dimana kapital tersebut didapat dari tabungan. Tapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang menekan upah. Oleh karena itu Malthus menjadi pesimis dengan perkembangan ekonomi.

2. Teori Neo Klasik

Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi tergantung pada bertambahnya penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal tetap digunakan sepenuhnya dari masa ke masa.

a. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi

sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya, dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat.

b. Teori Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh (*steady growth*). Semakin banyak modal maka produksi barang dan jasa semakin banyak. Jadi, berdasarkan teori ini ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang (*steady growth*).

c. Teori Robert Solow

Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang harus dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

2.1.3 Pengertian dan Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan barang-barang modal, barang-barang konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan -

kegiatan yang diselenggarakan negara atau pemerintah guna mewujudkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan (Hajrawati, 2021). Wegner (dalam Soetrisno 1984) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kegiatan - kegiatan pemerintah dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi. Teori pengeluaran pemerintah memiliki dua jenis teori yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Pada teori makro pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001). Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar sehingga menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah banyak. Kemudian, pada tahap lanjutan Rostow

berpendapat bahwa terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

- Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

1. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi kebudayaan dan sebagainya (Prasetya, 2012).

2. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam hal perilaku perkembangan pemerintah. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan pajak. Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Teori Colin Clark

Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Dimana Collin menyatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur

dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan hal ini akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membeli barang maupun jasa, dan pengeluaran pemerintah juga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat digunakan sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai langsung oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyaknya kegiatan pemerintah, maka semakin besar juga pengeluaran pemerintah yang akan dibiayai (Sri, 2014).

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat (Devi, 2017). Dengan adanya kenaikan pengeluaran pemerintah tentu akan menyebabkan penambahan suatu permintaan agregat, yang dimana permintaan agregat akan selalu mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga meningkat.

Pemerintah dalam menjalankan suatu perekonomian tentu memiliki beberapa fokus utama dalam hal menganggarkan kegiatannya, baik untuk publik maupun daerah. Apabila pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu (Lailan, 2011):

1. Pengeluaran Rutin. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara.

2. Pengeluaran Pembangunan. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun non fisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan.

Untuk menentukan besarnya jumlah pengeluaran, pemerintah tentu sangat berhati-hati dalam memperhitungkan besaran pengeluaran yang harus dikeluarkan, karena jika hal tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati maka akan berdampak kepada pihak-pihak tertentu dari kebijakan yang dibuat langsung oleh pemerintah. Pemerintah tentunya dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran

agregat selain fungsinya yang bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi suatu negara.

2.1.4 Pengertian dan Konsep Upah Minimum

Pemerintah dibanyak negara selalu berusaha melindungi kelompok yang lemah yaitu para buruh dalam hubungan kerja mereka dengan para pengusaha. Untuk melindungi para buruh, pemerintah menetapkan undang-undang suatu tingkat upah minimum yang boleh dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya. Tingkat upah minimum untuk suatu daerah disebut tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan ini berbeda antara daerah satu dan lainnya.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya (Riko, 2015). Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan terkadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, yaitu:

- a. Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.

e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara formal.

Upah Minimum Regional (UMR) ditentukan berdasarkan pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK), upah minimum yang berlaku secara regional kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan. Ketentuan UMR seharusnya tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari tingkat upah rata-rata yang terjadi di pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan jika UMR terlalu tinggi maka pengusaha akan sangat berhati-hati dalam memilih tenaga kerja yang akan digunakan, karena tenaga kerja akan dipilih berdasarkan kemampuan yang produktif dan efisien. Sehingga akan mengakibatkan UMR yang sangat tinggi akan menimbulkan tingkat pengangguran dan UMR hanya melindungi mereka yang telah bekerja (Suparmoko, 2009).

Upah dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang diperoleh seseorang setelah bekerja berupa uang dan barang melalui perjanjian kerja. Imbalan jasa yang dimaksud diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Dalam pengertian teori ekonomi, upah adalah pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Upah juga merupakan salah satu faktor krusial dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan upah berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan upah juga dapat menjadi indikator bagi beberapa sektor ekonomi untuk melakukan permintaan terhadap tenaga kerja. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk melindungi pekerja dari rendahnya tingkat upah, terutama pada saat tingkat

penawaran tenaga kerja yang tinggi sehingga tingkat upah tidak akan terus mengalami penurunan (Wilis, 2015).

Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja, sepanjang ketentuan upah dalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Jika ternyata ketentuan upah dalam perjanjian kerja bertentangan dengan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah dalam peraturan perundang-undangan (Budiono, 2009). Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2009).

1. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang telah dikorbankan para pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

2. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang diterima dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.

3. Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja yang jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2012).

Tingkat upah dapat mencerminkan tingkat produktivitas yang dimiliki oleh pekerja. Besarnya jumlah upah dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja sehingga output yang dihasilkan juga turut meningkat. Selain itu Todaro (2000) juga menyatakan bahwa upah cenderung menurun dan tidak pernah fleksibel, hal ini dikarenakan terdapat berbagai hal yang mempengaruhi misalnya dari kekuatan institusional seperti tekanan baik dari serikat dagang maupun serikat buruh. Pendapat Todaro juga sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi klasik yang menyatakan bahwa pada tingkat upah sulit mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada perekonomian tersebut terdapat kelompok pekerja yang selalu berjuang mempertahankan nasibnya dengan menuntut pemberian upah yang wajar bagi para pekerja. Setiap kebijakan yang dibuat untuk menurunkan tingkat upah selalu ditentang. Dengan demikian tingkat pengangguran juga mengalami peningkatan (Sukirno, 2012).

Logasakthi & Rajagopai (2013) berasumsi bahwa isu yang penting mendasari ekonomi sampai sekarang adalah bagaimana seseorang mampu menghasilkan pendapatan guna menutupi keinginannya di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Selain dari tujuannya untuk menutupi keinginan semata, pendapatan dapat pula digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat kesejahteraan seseorang.

Teori upah David Ricardo merupakan teori dimana mempertimbangkan kondisi pekerja, apabila standar hidup meningkat maka seharusnya tingkat upah yang dibayarkan juga akan meningkat. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi perubahan perekonomian secara menyeluruh pada suatu daerah maupun negara.

Selain itu, menurut teori Undang-Undang Upah Besi yang dikemukakan oleh Ferdinand Lassale (Asikin, 2012), teori ini menyatakan bahwa adanya tingkat upah yang ditetapkan oleh perusahaan. Penetapan ini bertujuan agar tingkat upah menjadi rendah. Hal ini dilakukan agar perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pada tingkat upah yang rendah, pekerja hanya dapat menerima kenyataan dan tidak dapat mempengaruhi tingkat upah. Konsekuensinya adalah para pekerja hanya dapat memenuhi hidupnya pada tingkat yang sangat minimal. Pekerja terpaksa menerima pekerjaan dengan tingkat upah yang jauh lebih rendah karena kedudukan pekerja dimata perusahaan sangat lemah.

Kemudian, menurut teori dana upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill bahwa tinggi rendahnya upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja ditentukan oleh dana upah yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau industri yang ada. Penawaran ditentukan oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Teori John Stuart Mill ini sangat relevan dengan keadaan upah di Indonesia dimana perusahaan akan melakukan permintaan tenaga kerja jika mereka mempunyai dana upah yang besar. Perusahaan yang memiliki dana upah yang besar maka akan melakukan permintaan tenaga kerja yang besar juga. Perusahaan dengan dana upah yang minim maka mereka akan membatasi permintaan tenaga kerja. Wilayah yang mempunyai banyak perusahaan besar atau industri besar biasanya wilayah itu juga memiliki tingkat permintaan tenaga kerja yang tinggi pula. Kota-kota besar di Indonesia contohnya, dimana kota-kota besar menjadi sasaran bagi tenaga kerja karena masyarakat menganggap bahwa di kota, permintaan akan tenaga kerja sangatlah banyak.

Penawaran tenaga kerja ditentukan oleh jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar menyebabkan penawaran akan tenaga kerja juga semakin besar pula. Di Indonesia yang jumlah penduduknya terbesar nomor 4 didunia juga mempunyai tingkat penawaran tenaga kerja yang besar. Penawaran tenaga kerja yang tinggi ini akan menjadi masalah kependudukan jika tidak diselingi oleh permintaan tenaga kerja yang tinggi. Ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja akan berdampak kepada pengangguran. Teori John Stuart Mill ini menunjukkan bahwasanya upah berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak dana upah yang dimiliki oleh perusahaan maka akan berdampak kepada banyaknya permintaan tenaga kerja yang ada di suatu wilayah.

Menurut Mankiw dalam Buchari (2016) upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Ketika pasar berada dalam kondisi ekuilibrium, masing-masing perusahaan membeli tenaga kerja dalam jumlah yang menguntungkannya, berdasarkan harga atau upah ekuilibrium itu berarti setiap perusahaan telah merekrut pekerja dalam jumlah dimana nilai produk marjinal sama dengan upah.

2.1.4 Pengertian dan Konsep Investasi

Investasi pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakat (Mankiw, 2003). Investasi merupakan

aktivitas menanamkan sejumlah dana untuk dikembangkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dimasa yang akan datang dengan tujuan untuk memperoleh profit ataupun keuntungan. Selain itu investasi juga merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Semakin banyak investor yang menanamkan sahamnya dalam suatu negara berarti keadaan negara tersebut aman dan stabil untuk dijadikan lahan berinvestasi (Fitriansyah, 2020). Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan sejumlah dana pada satu atau lebih selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Dornbusch, Fisher dan Startz (2015) juga menyatakan bahwa investasi adalah tambahan pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang dan modal yang digunakan dalam proses produksi. Stok barang modal (*capital stock*) ini terdiri dari pabrik, mesin kantor dan produk-produk tahan lama lainnya. Peran investasi sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara terutama bagi negara yang sedang berkembang. Dengan adanya penambahan investasi maka tentu akan memunculkan kegiatan produksi. Semakin tingginya kegiatan produksi maka akan membutuhkan tambahan pekerja dan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan artinya semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja (Eka Lestari, 2017).

Romdhoni (2017) menyatakan bahwa tujuan investor melakukan kegiatan investasi adalah untuk mencari (memperoleh) pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (*return*) yang akan diterima dimasa depan. Di sisi lain risiko (*risk*) juga melekat pada setiap aktivitas investasi, sehingga mengambil keputusan dalam berinvestasi perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Dalam teori ekonomi, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti serta menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang (Hamrullah, 2016). Dengan adanya pembentukan investasi hal ini menandakan bahwa investasi merupakan faktor penting yang bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada suatu negara.

Deliarnov (2005) menggolongkan investasi berdasarkan sumbernya menjadi dua yaitu: investasi yang bersumber dari dalam negeri atau biasa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dimana sumber ini berasal dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa serta investasi yang bersumber dari luar negeri atau yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dimana sumber ini dapat berupa bantuan luar negeri.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Swaramarinda (2011)

menyatakan bahwa pengaruh kekuatan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia harus bisa mengidentifikasi sektor prioritas yang memiliki potensi paling tinggi agar dapat meningkatkan pembangunan manusia.

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah yang dilakukan Keynes ialah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak serta penambahan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Menurut Keynes, kenaikan belanja pemerintah adalah untuk mengatasi pengangguran atau meningkatkan tenaga kerja, seperti perekrutan pegawai negeri sipil, polisi, militer dan meningkatkan kesempatan kerja di sektor swasta. Keynes dalam Dumairy (1997), mengungkapkan dengan adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

Menurut Barro (2001) dan Sun'an (2008) menyatakan bahwa kontribusi pengeluaran pemerintah yang produktif akan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja, sebaliknya jika pengeluaran tidak produktif maka akan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Noah Karley (2000) di Benua Afrika menyatakan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja ialah positif dan signifikan.

Karena pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan, pengeluaran yang direncanakan juga ikut mengalami peningkatan. Namun, ada keterbatasan barang dan jasa yang terproduksi. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan output agar produknya dapat sesuai untuk memenuhi rencana

pengeluaran. Mankiw (2003) menyatakan bahwa untuk meningkatkan output, perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di suatu negara.

Dengan adanya peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah dapat mendorong giatnya aktivitas ekonomi yang dapat mendorong produsen meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi membutuhkan tambahan *input* yaitu dengan menambah jumlah tenaga kerja. Penambahan jumlah tenaga kerja dapat memperluas kesempatan kerja. Sehingga hubungan langsung pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif (Brückner, 2012).

Wilis (2015) menyatakan bahwa selain adanya kebijakan anggaran (fiskal) diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal pada sumber-sumber dalam negeri. Dalam hal ini para produsen dalam negeri diberi rangsangan fiskal agar menggunakan teknologi produksi padat karya, dan bila perlu diberikan proteksi terhadap persaingan dengan luar negeri (Subandi, 2012). Salah satu fungsi pokok kebijakan anggaran belanja negara adalah fungsi stabilisasi. Termasuk ke dalam fungsi stabilisasi adalah tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Reksoprayitno, 2009).

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah adalah alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Tingkat efektifitas pengeluaran

pemerintah lebih berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) , dimana secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Mance, 2020). Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah ukuran sektor publik yang menjadi subjek penting untuk dianalisis. Pengeluaran publik biasanya berupa infrastruktur fisik atau *human capital* yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi dapat juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya tergantung dari *trade-off* antara pengeluaran publik yang produktif dan efek pajak yang bersifat distorsif.

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) (Sukirno, 2006).

Hukum Wagner (*Wagner Law*) yang dikemukakan oleh Adolf Wagner (dalam Solikin, 2018) menyatakan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Semakin maju suatu perekonomian, ukuran pemerintah juga akan semakin besar, dimana ukuran pemerintah tersebut diukur dengan besarnya pengeluaran pemerintah.

Bojanic (2013) dan Chude (2013) berpendapat bahwa belanja modal dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tergolong dalam kalangan bawah. Tingginya belanja modal menyebabkan semakin tinggi pula produktivitas

perekonomian yang dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah (Darwanis dan Saputra, 2014). Walaupun belanja modal dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian, pemerintah daerah tetap harus mengontrol dan menyesuaikan belanja daerahnya agar tidak melebihi dari pendapatan yang dimiliki. Peningkatan dana yang digunakan untuk belanja pemerintah tanpa peningkatan yang sesuai dalam pendapatan bisa menyebabkan anggaran menjadi defisit (Nwosu dan Okafor, 2014). Jika suatu daerah memiliki entitas belanja modal yang lebih tinggi per kapita dibandingkan dengan pendapatannya maka daerah tersebut harus melakukan penekanan dalam keuangannya (Brusca, 2015).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Rosita (2016) menyatakan bahwa dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu meningkatnya belanja modal juga diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah akan selalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena lima hal yang menjadi penyebabnya dan dikemukakan oleh Wagner yang menyatakan bahwa tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Maka pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka menyebabkan GNP (dalam penelitian ini adalah output) meningkat pula.

Menurut Hakim (2004) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yang dimana suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tergambarkan dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk wilayah regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan tentunya memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.

Kemudian penelitian Harijono (2013) yang tidak sependapat dengan teori makro Keynes, karena walaupun investasi sektor pemerintah dan swasta berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruhnya terhadap perluasan kesempatan kerja ternyata lemah. Hal tersebut disebabkan oleh investasi swasta yang berpengaruh lemah terhadap kesempatan kerja di Provinsi

Bali sehingga pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali terhadap kesempatan kerja pun juga menjadi lemah.

Selain itu, hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan penduduk atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik yang menjadi subjek penting untuk dianalisis dan diperdebatkan. Kontroversi utama adalah sektor publik dapat menaikkan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi (*Long Run Steady Growth Economy*) (Jamzoni, 2007). Selain itu, Harnita (2020) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bukan hanya untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, melainkan juga membiayai perekonomian serta senantiasa menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi sehingga pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu cara untuk menggerakkan permintaan yang dapat memompa suatu perekonomian yang sedang tertekan dan memulihkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (Heilbroner, 1982). Hal ini juga didukung oleh penelitian Kanigara (2021) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi sumber penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Adanya kenaikan permintaan agregat maka tentu akan mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan input produksi salah satunya ialah

tenaga kerja sehingga dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah.

Dengan belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat secara langsung akan berdampak pada penerimaan dan pembiayaan - pembiayaan daerah. Kinerja perekonomian daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik apabila pengeluaran pemerintah daerah atau belanja modal digunakan untuk sektor-sektor yang bersifat produktif. Seperti halnya pembangunan sarana dan prasarana yang dialokasikan dari belanja modal daerah, secara tidak langsung akan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan memberikan dampak secara langsung terhadap penciptaan tenaga kerja baru (Putri, 2014)

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi potensi atau modal bagi pembangunan ekonomi daerah karena menyediakan tenaga kerja berlimpah sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi produksi daerah (Ganie, 2017). Maka dari itu pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan adanya perluasan kesempatan kerja agar angkatan kerja yang tersedia dapat terserap. Daniel (2021) juga menyatakan bahwa belanja modal mampu meningkatkan pengembangan infrastruktur yang pada akhirnya mendorong tingkat produktivitas penduduk dan mampu menyerap tenaga kerja baru.

Penelitian Yuliana (2014) juga menyatakan bahwa belanja modal yang digunakan pada sektor-sektor produktif seperti halnya sarana dan prasarana yang memadai yang secara tidak langsung akan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi wilayah yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Selain itu, belanja modal dalam pelaksanaannya tentu memerlukan tenaga kerja sehingga belanja modal pada akhirnya akan memperluas penyerapan tenaga kerja (Hendarmin, 2012).

2.2.4 Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Ferdinand Lassale (dalam Asikin, 2012), teori ini menyatakan bahwa adanya tingkat upah yang ditetapkan oleh perusahaan. Penetapan ini bertujuan agar tingkat upah menjadi rendah. Hal ini dilakukan agar perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pada tingkat upah yang rendah, pekerja hanya dapat menerima kenyataan dan tidak dapat mempengaruhi tingkat upah. Konsekuensinya adalah para pekerja hanya dapat memenuhi hidupnya pada tingkat yang sangat minimal. Pekerja terpaksa menerima pekerjaan dengan tingkat upah yang jauh lebih rendah karena kedudukan pekerja dimata perusahaan sangat lemah.

Menurut John Stuart Mill (2000) dalam teori upah menerangkan bahwa tinggi rendahnya upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Selain itu G. Reynold (dalam Ramli, 2016) menyatakan bahwa upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi.

Karl Marx juga berpendapat bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh, sehingga pengusaha dapat menekan upah. Akibat dari pengurangan penggunaan buruh, maka menimbulkan pengangguran besar-besaran.

Dirta (2016) menyatakan bahwa bagi pengusaha yang menganggap upah mereka berupa biaya, kenaikan ini tentu menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, dengan adanya kenaikan upah minimum, pengusaha cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Hal ini tentu mengurangi pasar tenaga kerja bagi angkatan kerja di suatu wilayah, akan tetapi disisi lain pekerja yang mendapatkan upah lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitasnya.

Terjadinya peningkatan upah akan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga barang per unit. Kemudian, akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga pada suatu barang sehingga tingkat konsumsi ikut menurun yang pada akhirnya menyebabkan produk tidak habis terjual karena kurangnya konsumsi masyarakat dan perusahaan memaksa untuk mengurangi jumlah produksinya (Wahidiah, 2019). Dengan adanya penurunan jumlah produksi suatu barang maka akan mengakibatkan turunnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketika tingkat upah meningkat, beberapa pengusaha lebih memilih menggunakan teknologi untuk proses produksi dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan barang dan modal seperti mesin (Sumarsono, 2009).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nurtiyas (2016) yang menyatakan bahwa semakin tingginya tingkat upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, maka semakin rendah kemungkinan pekerja akan berhenti dari pekerjaannya. Sebuah perusahaan dapat mengusahakan untuk mengurangi perputaran pekerja dengan membayar upah yang lebih tinggi. Hal ini

dikarenakan, perusahaan akan menghadapi masalah, seperti bagi perusahaan akan lebih mahal jika mereka merekrut dan melatih pekerja baru. Perusahaan yang mengalami perputaran pekerja yang tinggi tentunya akan memiliki biaya produksi yang tinggi serta bagi perusahaan mungkin akan lebih menguntungkan apabila membayarkan upah pekerja di atas tingkat equilibrium dalam rangka untuk mengurangi perputaran pekerja (Nurtiyas, 2016).

Selain itu Sulistiawati (2012) juga berpendapat bahwa perusahaan hanya akan membayar upah tenaga kerja sesuai dengan produktivitasnya, artinya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah akan menerima upah yang rendah dan sebaliknya. Gindling dan Terrell (2007), yang menyatakan pula bahwa dengan adanya kenaikan upah minimum, diprediksi akan menyebabkan peningkatan jam kerja dari pekerja yang tetap bekerja (biasanya pekerja dengan keahlian tinggi) yang menyebabkan penurunan jumlah pekerja terampil rendah. jam kerja dari pekerja dengan keahlian tinggi akan bertambah akibat kenaikan upah minimum, hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengkompensasi pengurangan jumlah pekerja akibat kenaikan upah minimum.

Ayu (2018) juga menyatakan bahwa beberapa daerah juga melakukan pengenaan upah sektoral. Adanya pengenaan upah sektoral ini membebani perusahaan sebesar 5 persen. Hal ini berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk bergeser dari industri padat karya menjadi padat modal, dan bahkan pilihan yang lebih ekstrim lagi yaitu memindahkan perusahaan ke Negara lain. Hal inilah juga yang kemungkinan besar menjadi salah satu penyebab mengapa pada setiap tahunnya penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan.

2.2.5 Hubungan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Robert M. Solow (1956) dan T.W. Swan (1956) menyatakan bahwa dengan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berpengaruh. Sehingga mengakibatkan modal akan mengalir dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya rendah karena akan memberikan balas jasa (untuk modal) yang lebih tinggi. Sedangkan sebaliknya, tenaga kerja akan mengalir dari daerah upah rendah ke daerah upah tinggi. Mekanisme di atas pada akhirnya menciptakan balas jasa faktor-faktor produksi di semua daerah sama.

Menurut Karl Marx dalam hal sistem pengupahan menyatakan bahwa sistem pengupahan memberikan insentif yang perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional dalam hal ini pertumbuhan ekonomi. Kemudian, teori pengupahan dengan dasar hukum penawaran dan permintaan menurut Adam Smith (1723-1790) yang menyatakan bahwa bila upah di sektor industri jauh lebih tinggi dari upah di sektor pertanian, maka sebagian besar pekerja akan berpindah dari pertanian ke sektor industri agar memperoleh upah yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang didominasi pada sektor industri.

Terdapat pengaruh timbal balik dalam hubungan tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi. Dimana pengaruh timbal balik antara tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi tercermin dalam dua aspek. Pertama untuk pekerja, upah merupakan pendapatan, dimana kenaikan upah tentu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dapat mendorong permintaan konsumsi. Di waktu yang sama, upah merupakan biaya perusahaan, dimana peningkatan

upah menyebabkan biaya produksi perusahaan meningkat yang dapat mengurangi efisiensi produksi perusahaan yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Melalui model simulasi upah *multi-atribut* yang ditingkatkan, maka diperoleh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan siklis dengan menggunakan analisis data aktual USA 1982 - 2013 (Xu, 2015).

Askenazy (2003) menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia. Sehingga implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif. Selanjutnya, Sumarsono (2009) menyatakan bahwa beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan adanya pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.

Hasil penelitian oleh Flaschel (2011) menyatakan bahwa penerapan upah minimum dengan batasan tertentu dapat meningkatkan stabilitas perekonomian. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahuc (1996) yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki efek positif pada pertumbuhan dan efisiensi ekonomi.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Zulaeha (2021) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana jika kebijakan upah minimum ini membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Karena upah yang tinggi akan

meningkatkan komitmen dan produktivitas yang tinggi pada perusahaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.2.6 Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, upah mempunyai kedudukan strategis, baik bagi pekerja dan keluarganya, bagi perusahaan maupun bagi kepentingan nasional. Bagi pekerja, upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai perangsang bagi peningkatan produktivitas. Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah, selain itu dengan adanya kenaikan upah minimum bagi pekerja maka akan mendorong kegairahan untuk bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Dirta, 2016).

Sova (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa upah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti pemberian upah yang ditetapkan sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi sebab besar kecilnya upah tergantung dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi atau dari keseluruhan aktivitas nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan seberapa banyak sektor-sektor yang ada di suatu wilayah dan dapat menyerap tenaga kerja yang ditawarkan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan upah minimum dalam jangka panjang, maka menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terserap yang dimana penyerapan tenaga kerja merupakan tersedianya lapangan kerja atau kesempatan kerja yang siap diisi oleh mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Selanjutnya terdapat pengaruh timbal balik dalam hubungan internal antara upah dan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, pengaruh timbal balik antara upah dan pertumbuhan ekonomi tercermin dalam dua aspek. Bagi pekerja, upah berarti pendapatan, kenaikan upah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dapat mendorong permintaan konsumsi yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja baru (Alfisyahrin, 2021). Pada saat yang sama, upah berarti biaya perusahaan, peningkatan upah meningkatkan biaya produksi perusahaan yang dapat mengurangi efisiensi produksi perusahaan dan pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Indradewa & Natha (2013) menyatakan bahwa dengan terjadinya peningkatan upah minimum maka akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, tingginya daya beli masyarakat tentu akan meningkatkan permintaan produksi, dan pada akhirnya perusahaan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk menghasilkan output yang lebih besar.

Mahesa Putra & I Nyoman (2020) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa semakin meningkatnya nilai upah minimum maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja dan membuat usaha sehingga produksi dalam wilayah tersebut akan semakin meningkat. Atau dengan kata lain peningkatan upah minimum diikuti dengan peningkatan minat masyarakat dalam membangun usaha sehingga tingkat kreativitas produk meningkat dan tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dengan banyaknya usaha di wilayah tersebut menggambarkan bahwa semakin banyak lapangan kerja baru,

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan ketika seseorang ataupun perusahaan membuka usaha, dimana untuk memperoleh output tentu memerlukan faktor produksi, salah satunya tenaga kerja.

2.2.7 Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi ataupun jumlah industri. Peningkatan investasi ini sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap hasil produksi baik permintaan dari dalam negeri. Permintaan tersebut merupakan pasar dan hal ini berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi.

Investasi bertujuan untuk memaksimalkan output total pada satu titik waktu atau satu periode waktu. jumlah investasi yang terlaksana atau terealisasi sangat berperan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam satu masyarakat dan kurangnya investasi akan menimbulkan pengangguran (Sukirno, 1994). Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan memberikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaannya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya dan faktor-faktor produksi lainnya .

Menurut Todaro (2000), investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun

menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi target utama bagi seluruh negara, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang positif maka akan semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada negara tersebut, sehingga dengan demikian banyak investor yang akan masuk sehingga akan mengakibatkan ketersediaan modal semakin meningkat, serta dari sini investasi juga akan turut meningkat, dan pada akhirnya akan memperluas kesempatan kerja yang ditawarkan (Zahari, 2017).

Pemerintah juga perlu meningkatkan investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja secara maksimal, sehingga setiap adanya penambahan investasi diharapkan akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor ekonomi yang akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat agar dapat mengakses pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak untuk menopang konsumsi dan investasi di masa yang akan datang (Basri, 2015). Peran investasi sangat penting bagi perekonomian terutama bagi suatu negara yang sedang berkembang. Dengan adanya penambahan investasi tentu akan memunculkan kegiatan produksi. Semakin tinggi kegiatan produksi maka akan menambah jumlah pekerja serta semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja.

Menurut Arsyad (1999) yang menyatakan bahwa hasil produksi yang optimal di suatu daerah berarti membawa pengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja, dimana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan produksi suatu daerah maka daerah tersebut akan keluar dari lingkaran kemiskinan serta

kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga akan meningkat. Apabila dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, investasi tentunya memiliki pengaruh yang tidak sedikit. Hal ini disebutkan oleh Tambunan yang menjelaskan bahwa investasi sangatlah erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya kegiatan investasi maka akan mendorong munculnya proses produksi (output), dimana output ini dihasilkan oleh tenaga kerja. Dengan demikian terciptalah kesempatan kerja baru yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ketika pendapatan masyarakat mulai meningkat, ini menandakan bahwa tabungan yang dimiliki masyarakat akan mendorong kegiatan investasi yang disebabkan oleh bunga bank yang cukup rendah sehingga banyak investor yang akan menginvestasikan modalnya ke sektor-sektor ekonomi (Lailan, 2011). Jhingan (2012) juga menyatakan bahwa kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan, maka dari itu muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang kemudian menyebabkan kenaikan pada pendapatan dan pekerjaan. Tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, sehingga tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat, dan akhirnya akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga sama yang disampaikan oleh Prasojo (2009), yang menyatakan bahwa adanya investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada

gilirannya akan mengurangi tingkat pengangguran. Investasi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Perusahaan dapat menggunakan investasi untuk menambah penggunaan faktor produksi. Apabila perusahaan memilih menggunakan investasi yang ada untuk menambah faktor produksi tenaga kerja maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya, apabila perusahaan memilih menggunakan investasi untuk menambah mesin-mesin atau peralatan dalam proses produksi maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Hal ini dikarenakan mesin-mesin atau peralatan dapat menggantikan tenaga kerja (Sabihi, 2021).

2.2.8 Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu sangat membutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi pada suatu negara, khususnya penanaman modal asing karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Jika penanaman investasi dikelola dengan baik dan benar maka akan membuka kesempatan yang baik untuk memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi negara yang berkelanjutan.

Teori Harrod Domar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh baik antara kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori ini, kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak

kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat.

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Adanya hubungan timbal balik ini terjadi di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta juga akan semakin besar. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi negara, maka akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari investasi (Novita, 2017).

Nurkse dalam Jhingan (2012) juga menjelaskan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan lingkaran yang tak berujung pangkal (*vicious circle*). Ketika dana untuk melakukan investasi terbatas sehingga dapat mengurangi stok modal, hal itu menandakan bahwa kemampuan menabung dalam suatu negara rendah. Kondisi ini tentu mengakibatkan produktivitas maupun kapasitas produksi menurun yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi rendah dan menjadikan pendapatan masyarakat juga menurun.

Selain itu, Todaro (2000) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Karena semakin besar investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang akan

dicapai. Menurut Sukirno (2008) juga menjelaskan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari investasi, yaitu: pertama investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga dengan adanya kenaikan investasi tentu akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Kedua, penambahan barang modal sebagai akibat dari kegiatan investasi akan menambah kapasitas produksi. Ketiga, investasi selalu diikuti dengan adanya perkembangan teknologi.

Investasi yang mampu mendorong pertumbuhan bukan hanya berasal dari tabungan domestik saja. Investasi dari luar negeri juga dapat mempengaruhi GDP dan GNP dengan cara yang berbeda. Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik ini terjadi karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Namun, disisi lain semakin besar investasi suatu negara, baik dalam negeri maupun asing maka akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari investasi (Hadi, 2013).

Windy (2018) menyatakan bahwa penanaman modal akan berakibat peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap daerah atau wilayah memerlukan investasi untuk meningkatkan kualitas produksi yang dimiliki wilayahnya, investasi haruslah ditanamkan di berbagai

sektor ekonomi, agar memperluas pasar, serta produk yang dihasilkan mampu bersaing dan memiliki harga jual yang tinggi tentunya dengan kualitas bagus, sehingga mampu meningkatkan perekonomian. Hal ini sesuai dengan teori Samuelson (2004), investasi merupakan suatu hal yang penting dalam membangun ekonomi karena dibutuhkan sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi.

2.29 Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Dampak dari kenaikan permintaan investasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan mampu meningkatkan terciptanya kesempatan kerja baru sebagai akibat adanya peningkatan pendapatan dan permintaan output dalam masyarakat (House dan Shapiro, 2005). Selain itu penelitian Sitompul (2007) dan Rustiono (2008) juga menemukan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Lewis dalam Todaro (2006) menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dimulai dari investasi di sektor industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern yang akan menimbulkan perluasan output pada sektor modern tersebut. Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan *output* dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Menurut Kuncoro (2010),

pertumbuhan ekonomi juga tergantung dari besaran nilai investasi yang mampu menggerakkan perekonomian. Hal ini juga sejalan dengan Todaro (2000), dimana investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena adanya pembentukan modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini yang tentunya akan semakin memperluas kesempatan kerja.

Peran investasi sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara terutama bagi negara yang sedang berkembang. Dengan adanya penambahan investasi maka tentu akan memunculkan kegiatan produksi. Semakin tingginya kegiatan produksi maka akan membutuhkan tambahan pekerja dan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan artinya semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja (Eka Lestari, 2017). Investasi juga merupakan komponen utama dan dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ismei (2015), nilai investasi dapat menjadi salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi dan selain dapat mendorong kenaikan *output* secara signifikan, investasi juga akan meningkatkan permintaan *input* yaitu tenaga kerja. Sehingga dengan adanya investasi dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempengaruhi penyediaan kesempatan kerja.

Peningkatan investasi pada suatu perusahaan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan dapat meningkatkan jumlah *output* yang akan dihasilkan, sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Ismei, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi target utama bagi seluruh negara, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang positif maka akan semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada negara tersebut, sehingga dengan demikian banyak investor yang akan masuk sehingga ketersediaan modal semakin meningkat, serta dari sini investasi juga akan turut meningkat, dan pada akhirnya akan memperluas kesempatan kerja yang ditawarkan (Zahari, 2017).

Para ekonom juga menyepakati bahwa tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2014) yang menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan investasi yang tinggi akan meningkatkan hasil produksi, karena dalam proses produksi dibutuhkan biaya-biaya yang digunakan untuk dilakukan pembelian bahan baku, peralatan dan membayar gaji karyawan dengan meningkatnya hasil produksi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang selanjutnya akan diikuti terciptanya lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak (Muhammad, 2014).

Pembangunan daerah memerlukan investasi yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang baik yang didukung dengan kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Investasi dari dalam maupun luar negeri harus memiliki manfaat bagi pemerintah daerah, pihak investor, lingkungan maupun masyarakat. Semakin membaiknya iklim investasi di daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan investasi pemerintah daerah dapat memprediksi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi yang besar akan berdampak pada terciptanya barang modal baru, sehingga akan meningkatkan korelasi dengan faktor produksi baru. Dengan demikian, akan dapat menciptakan peluang kerja yang banyak dan mampu mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan (Todaro, 2006).

2.2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan karena tenaga kerja yang akan menggerakkan semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang. Tingginya jumlah tenaga kerja akan terbentuk dari jumlah penduduk yang juga tinggi. Penduduk di suatu wilayah yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu wilayah untuk menambah tingkat produksinya.

Dengan adanya perluasan kesempatan kerja, tentu akan meningkatkan pendapatan sekaligus akan mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi

kesenjangan di lapisan masyarakat. Namun, sebaliknya jika jumlah angkatan kerja yang tinggi dan tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja maka akan membebani pembangunan suatu negara. Sehingga akan meningkatkan angka pengangguran dan tentunya akan mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat. Dengan adanya kesempatan kerja baru tentu akan menciptakan pendapatan masyarakat yang akan mendorong *induced investment*, sehingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian, secara tidak langsung jumlah angkatan kerja yang bekerja menggambarkan kondisi dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Semakin besar lapangan pekerjaan yang tersedia maka tentu akan semakin banyak angkatan kerja yang terserap (Utomo, 2020). Dengan terserapnya angkatan kerja maka total produksi di suatu daerah akan meningkat.

Feriyanto (2014) juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan peranan yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari sumber daya manusia dengan jumlah yang besar, produktif dan efisien. Adanya penambahan pendapatan nasional dapat dilihat oleh produktivitas sumber daya manusia serta pencapaian efisiensi kerja sehingga diharapkan akan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau daerah salah satunya yaitu melalui sumber daya manusia dengan cara meningkatkan produktivitas, keterampilan serta pengetahuan yang mereka miliki.

Artana Yasa dan Arka (2015), berpendapat bahwa tenaga kerja yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menguasai teknologi dapat menumbuhkan iklim yang positif dan baik bagi pertumbuhan ekonomi di

suatu wilayah. Besarnya jumlah tenaga kerja yang tersedia akan mampu meningkatkan tenaga kerja produktif yang tersedia, sedangkan dengan semakin besarnya pertumbuhan ekonomi maka tentu akan mampu memperluas pasar domestiknya. Hal ini akan terjadi jika suatu wilayah memiliki tenaga kerja produktif yang akan terserap secara optimal pada lapangan tenaga kerja yang tersedia, namun sebaliknya hal ini akan menjadi suatu masalah kompleks jika pertumbuhan dari tenaga kerja lebih besar melebihi angka kesempatan kerja yang tersedia dan hal ini akan mendorong tingginya angka pengangguran.

Lincolyn (1992) dalam Sinaga (2005) menyatakan bahwa pendapat Robert Sollow dan Trevor Swan mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Swan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada adanya penambahan kualitas dan kuantitas faktor produksi. Teori ini mendukung pendapat teori kaum neo klasik, yaitu perekonomian dalam *full employment* jika faktor produksi senantiasa berkembang secara harmonis. Teori ini mengemukakan bahwa penambahan penduduk dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Semakin besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin tingginya total

produksi di suatu wilayah yang menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Dengan semakin bertambahnya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja yang turut terlibat dalam proses produksi, maka akan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi semakin bertambah, sehingga akan mengakibatkan pendapatan suatu wilayah juga meningkat dikarenakan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat meningkat, serta hal ini akan memberi dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Yola, 2015). Raharja dan Manurung (2008) juga menyatakan bahwa besarnya output nasional yang dihasilkan suatu perekonomian pada suatu periode tertentu memberikan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya (antara lain tenaga kerja dan barang modal) yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, juga memberikan gambaran tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara.

2.3 Tinjauan Empiris

Beberapa hasil studi empiris lainnya yang menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah, upah minimum dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi menemukan hasil yang berbeda diantara para peneliti. Sebagian peneliti berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah, upah minimum dan investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian lainnya juga berpendapat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara hubungan variabel tersebut.

Tahir (2018) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2002-2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian variabel Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mudiarcana dan Marhaeni (2018) meneliti analisis pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan runtun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali secara langsung berpengaruh positif dan signifikan. Investasi, pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Harijono dan I Made (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi di Provinsi Bali terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berbentuk panel seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali periode 2006-2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di Provinsi Bali. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi signifikan, namun lemah terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh lemah terhadap kesempatan kerja.

Ziyadaturrofiqoh, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 1997-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMP dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi periode 1997-2015. Serta secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi sedangkan UMP dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

Wildan (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Investasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh investasi, laju pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja serta laju pertumbuhan ekonomi dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor.

Eka Lestari (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Upah, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2012-2015. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah data panel dengan analisis regresi data panel dan menggunakan data *time series* dari tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di Indonesia tahun 2012-2015.

Berbeda dengan penelitian dari Ni Putu Ambar (2019) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali serta menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan

masyarakat. Metode analisis data yang digunakan ialah *Path Analysis*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

Irwan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Sehingga adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dwi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh PDRB, investasi, upah dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data yang digunakan adalah menggunakan data panel (*cross section dan time series*) dengan metode analisis *Panel Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Eka & Wayan (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB riil, upah riil, harga modal bidang pertanian dan indeks harga implisit terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen PDRB riil dan harga Modal di bidang pertanian secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan PDRB riil dan Modal di bidang pertanian akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu Variabel Upah riil secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan Upah riil akan menurunkan Penyerapan Tenaga Kerja.

Jafary (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2015*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh UMK, pariwisata, PDRB dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Selain itu penelitian ini menggunakan alat analisis panel data serta menggunakan metode analisis *Common Effect* (CE), *Fix Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE) dengan menggunakan uji chow dan hausman test. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel UMK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian variabel pariwisata, PDRB dan investasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2006-2015.

Reniaty (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Unemployment and Investment Levels on Economic Growth in The Province of Bangka Belitung Islands, 2015-2019*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan struktur data panel. Adapun hasil penelitian ini adalah investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2015-2019.

Sunarsih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Minimum Wage on Employment, Economic Growth and Social Welfare in The Ex Besuki Residency of East Java-Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat serta pengaruh upah terhadap pertumbuhan ekonomi di eks Karesidenan Besuki Jawa Timur, Indonesia. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di eks Karesidenan Besuki.

Maryati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Labor Absorption and Growth Towards The Demographic Bonus Era in West Sumatra*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel ekonomi (PDRB) dan demografi (IPM). Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series*. Selain itu peneliti juga menggunakan model mometrik. Kemudian hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekonomi (PDRB) dan variabel demografi (IPM) berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

Amani dan Eddy (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur besar dan sedang di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data *time series* dari tahun 2011-2015 dan sekaligus menggunakan data *cross section* yaitu 29 Kabupaten dan 9 Kota. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai produksi dan jumlah unit usaha secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja industri manufaktur. Sedangkan variabel upah minimum regional memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur besar dan sedang. Kemudian secara parsial Secara parsial, variabel nilai produksi dan jumlah unit usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur besar dan sedang di Jawa Timur. Sedangkan variabel upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur besar dan sedang di Jawa Timur.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan pada teori dan studi empiris yang telah dikemukakan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara pengeluaran pemerintah, upah minimum dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel tersebut juga dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Perluasan kesempatan kerja masih menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi, hal ini mengingat besarnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan besarnya angka pencari kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kondisi demikian akan menjadi masalah jika tidak didukung oleh kekuatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja (Simanjuntak, 1985). Untuk memajukan pembangunan ekonomi dibutuhkan partisipasi yang besar antar sektor perekonomian, dimana kerjasama ini diharapkan dapat menjadikan daya tarik dan daya dorong setiap sektor. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga didukung oleh Zulhanafi, dkk (2013) yang menyatakan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat berarti sedang terjadi kenaikan terhadap produksi barang dan jasa karena kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap faktor-faktor produksi salah

satunya tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi tentu akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan akan menurunkan angka pengangguran.

Selain pertumbuhan ekonomi, investasi juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Investasi merupakan akumulasi modal yang dapat menciptakan perluasan *output*. Perluasan *output* membutuhkan penambahan faktor-faktor produksi dimana salah satu faktor produksi adalah tenaga kerja. Kemudian dengan adanya peningkatan jumlah investasi tentu akan membuka kesempatan kerja baru. Hal ini tentu menunjukkan bahwa investasi dan penyerapan tenaga kerja berhubungan positif secara langsung (Syaihu, 2012). Maka dari itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tentu memerlukan biaya yang cukup besar sehingga dengan cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ialah dengan berusaha meningkatkan investasi (Adrian, 2010).

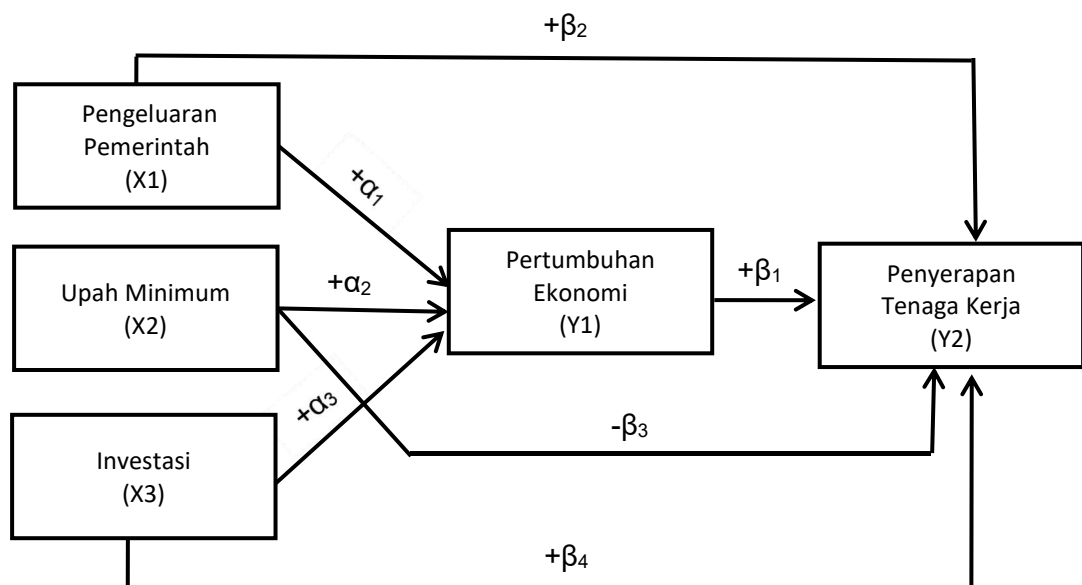
Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan daya tariknya terhadap investasi adalah salah satunya dengan cara tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menarik perhatian investor ialah dengan cara mengadakan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Serta dengan adanya ketersediaan modal dalam bentuk investasi maka akan meningkatkan pembangunan suatu wilayah. Sehingga, jika modal tidak ada dalam proses pembangunan maka akan menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. (Najmaya, 2020).

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para

pekerja. Menurut Sumarsono (2009), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu : a) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang; c) menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Selanjutnya Sumarsono (2009) juga menyatakan bahwa beberapa ekonom melihat penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.

Menurut Iksan (2010), masalah dalam penetapan upah minimum ialah ada pada metode perhitungannya. Ada perbedaan nyata dari produktivitas antar sektor. Sektor-sektor yang menggunakan buruh terdidik umumnya telah membayar upah jauh diatas upah minimum karena hal ini mencerminkan produktivitas, tetapi banyak sektor lain yang produktivitasnya ada di bawah upah minimum sehingga kebijakan upah minimum akan memukul sektor ini yang pada umumnya merupakan sektor padat karya. Penentuan nilai upah dapat menentukan besar kecilnya nilai investasi dengan memandang upah sebagai biaya produksi. Upah buruh yang rendah akan menurunkan beban biaya dan akan meningkatkan laba perusahaan. Hal inilah yang dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya. Peningkatan investasi dapat mendorong ekspansi perusahaan yang tentunya dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Sehingga hubungan upah dan penyerapan tenaga kerja adalah negatif melalui investasi (Tapparan, 2017).

Menurut Haryani (2002), jika tingkat upah meningkat maka permintaan tenaga kerja akan menurun, yang artinya jumlah tenaga kerja yang diminta akan semakin berkurang namun penawaran tenaga kerja akan semakin bertambah. Tapi sebaliknya, jika tingkat upah menurun maka permintaan tenaga kerja akan semakin meningkat. Naiknya upah maka akan menyebabkan biaya produksi industri akan naik, yang kemudian akan menaikkan harga barang yang diproduksi. Sehingga, naiknya harga barang tentu akan mengurangi jumlah konsumsi masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah model penelitian. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperjelas kerangka pikir penelitian, maka hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Pikir Penelitian

3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian teoritis dan studi empiris yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
2. Diduga upah minimum secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan secara tidak langsung upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
3. Diduga investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).